

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Turki dan Yunani merupakan negara yang saling berbatasan langsung, dan dalam sejarahnya sendiri kedua negara ini memiliki berbagai catatan konfrontasi dan konflik diantara satu sama lain, sejarah tersebut membuat kedua negara tersebut sebagai rival kawasan yang saling bertetangga (Heraclides, 2011). Walaupun demikian terdapat perubahan sikap yang signifikan semenjak rezim AKP yang dipimpin oleh Erdogan memenangkan pemilu di Turki. Perubahan yang terjadi sendiri adalah bagaimana sejak tahun 2002 Turki mulai membangun relasi baik dengan Yunani melalui berbagai kerjasama bilateral (Koukoudakis, 2015). Meskipun telah membangun relasi yang baik, ternyata pemerintahan AKP di tahun 2016 kembali mengubah sikapnya terhadap Yunani dari yang awalnya kooperatif kemudian menjadi asertif, hal tersebut kemudian kembali menciptakan ketegangan diantara kedua negara tersebut. Tulisan ini kemudian membahas terkait alasan-alasan perubahan sikap Turki dalam masa pemerintahan AKP dari yang awalnya bersikap kooperatif, berubah menjadi asertif.

Dalam sejarahnya sendiri, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Turki dan Yunani memiliki relasi yang cukup konfliktual dimulai dari era Perang Dunia I, Turki dan Yunani telah berkonflik dalam *Greco-Turkish War* 1919-1922 yang berujung pada perjanjian Lausanne 1923 yang akhirnya menjadi persetujuan pembagian wilayah serta perlindungan hak-hak minoritas di Turki dan Yunani (Pizzo, 2011). Kemudian pada tahun 1930-1960an tensi diantara kedua negara masih juga tinggi, dimulai dari terjadinya *Istanbul Pogrom* dimana terdapat masyarakat Turki di Istanbul yang menyerang masyarakat minoritas etnis Yunani hingga tensi tinggi terkait isu Siprus di tahun

1960an. Konflik besar juga terjadi pada tahun 1974 dimana organisasi para-militer *Greek-Cypriots* yang dipimpin Nikos Sampson pada saat itu melakukan penggulingan kekuasaan terhadap pemerintahan Siprus. Hal tersebut mengakibatkan Turki untuk melakukan invasi ke Siprus dan akhirnya berhasil menguasai wilayah utara dari Siprus (Vlachos, 2007). Hal tersebut akhirnya memecah Siprus menjadi dua wilayah, yaitu wilayah selatan yang berpopulasi masyarakat Yunani Siprus, wilayah utara yang berpopulasi masyarakat Turki Siprus (Xypolia, 2017). Konflik di Siprus sendiri membuat sampai saat ini kedua negara memiliki sengketa teritori.



Gambar 1: Peta Turki dan Yunani

Sumber: The Arab Weekly (2020)

Relasi antara Turki dengan Yunani sendiri pada tahun 1999 mulai mengalami proses normalisasi lewat diplomasi gempa bumi, dimana Turki dan Yunani sama-sama terkena gempa bumi dalam waktu yang berdekatan, dan dua negara tersebut kemudian saling memberikan bantuan satu sama lain (Koukoudakis, 2015). Peristiwa tersebut membuat relasi Turki-Yunani menjadi lebih baik. Koukoudakis (2013) sendiri menyatakan bahwa sejak tahun 2000 hingga 2013 terdapat lebih dari 100 perjanjian bilateral antara kedua negara tersebut yang berkontribusi pada perkembangan soso-

ekonomi dari kedua pihak. Kerjasama diantara kedua negara sendiri dapat dikatakan cukup intens ketika AKP memenangkan pemilu pada tahun 2002.

Dalam masa pemerintahan AKP sendiri Turki dan Yunani melaksanakan kerjasama dalam berbagai bidang mulai dari bidang energi hingga pariwisata. Dalam bidang energi Turki dan Yunani melakukan kerjasama pembangunan jaringan pipa energi yang dinamakan Interconnector-Turkey-Greece-Italy (ITGI) yang mulai dibangun pada tahun 2005 (Koukoudakis, 2015). Selain itu Turki dan Yunani sejak tahun 2002 juga mengadakan *exploratory talks* untuk membahas terkait potensi sumber daya di kawasan Aegean (Psaropoulos, 2021). Relasi baik itu sendiri juga menciptakan tren positif dalam kerjasama ekonomi diantara kedua negara di 2012 sendiri jumlah transaksi antara Turki-Yunani meningkat hingga 6.5 miliar dollar (Koukoudakis, 2015).

Pada tanggal 15 Juli 2016 Turki kemudian mengalami peristiwa percobaan kudeta yang mengguncang kondisi politik domestiknya. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik balik dari adanya perubahan kebijakan luar negeri Turki yang semakin asertif. Walaupun demikian pasca peristiwa itu terjadi Yunani langsung menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan terpilih (Hellenic Republic Ministry of Foreign Affair, 2021). Selain itu Erdogan juga tengah merencanakan untuk melakukan kunjungan ke Yunani pada tahun 2017, yang membuat adanya citra bahwa kerjasama yang terjadi antara Turki dengan Yunani tetap akan bertahan baik ditengah adanya permasalahan isu domestik.

Pada tahun 2017 sendiri Erdogan kemudian melakukan kunjungan ke Yunani. Kunjungan itu sendiri menjadi ikonik bagi kedua negara karena ini adalah kali pertama presiden dari Turki mengunjungi Yunani sejak 65 tahun yang lalu. Walaupun demikian dalam kunjungan tersebut, Erdogan dalam pidatonya malah menyinggung berbagai hal sensitif diantara kedua negara seperti keinginan Erdogan untuk melakukan revisi terhadap Perjanjian Lausanne 1923 yang dianggapnya

telah usang, kemudian lemparan kritik terhadap perlakuan pemerintah Yunani terhadap masyarakat Muslim Yunani di Thrace, hingga kritik Erdogan secara publik terhadap kebijakan Yunani untuk tidak mengekstradisi delapan tersangka pelaku kudeta Turki (BBC, 2017). Kunjungan tersebut kemudian akhirnya menciptakan dialog yang cukup alot diantara Erdogan dengan Alexis Tsiparas selaku Perdana Menteri Yunani pada saat itu.

Asertivitas dari Turki sendiri dapat dilihat melalui Turki yang seringkali melakukan provokasi melalui pelanggaran-pelanggaran wilayah, Yunani sendiri mencatat bahwa pada penghujung tahun 2017 terdapat 3.317 pelanggaran udara yang dilakukan oleh Turki, kemudian tensi juga meningkat di kawasan laut Aegean pada tahun 2018 Turki menabrak kapal patroli Yunani di perairan pulau Imia (Ifantis, 2018). Selain itu pada tahun 2018 tentara Yunani juga melemparkan tembakan peringatan kepada helikopter Turki yang mendekati kepulauan Ro (Squires, 2018). Berbagai provokasi-provokasi ini terus meningkatkan tensi antara Turki dengan Yunani, yang membuat banyak kerjasama diantara kedua negara menjadi terhenti.

Turki juga menjadi semakin asertif dalam kasus sengketa teritori di Laut Mediterania. Laut mediterania sendiri menjadi kawasan strategis bagi negara-negara di sekitarnya, mengingat Laut Mediterania menyimpan kekayaan sumber daya alam berupa karbon dan juga merupakan laut penghubung untuk berbagai negara kawasan (Marcus, 2020). Turki sendiri memiliki orientasinya tersendiri di kawasan mediterania tersebut yaitu mengamankan klaim-klaim teritorial Turki di kawasan laut mediterania, khususnya laut mediterania timur. Tindakan asertif Turki di kawasan tersebut sendiri merupakan upaya untuk mengamankan klaim-klaim wilayah Turki yang ada.

Tindakan asertif Turki di kawasan mediterania sendiri sebenarnya merupakan salah satu bagian dari doktrin geostrategi Turki di kawasan. Pasca percobaan kudeta tahun 2016 pemerintah Turki mencoba memperkuat pertahanan laut di sekitarnya dengan melakukan klaim-klaim teritori di

lautan yang mengelilingi Turki. Konsep geostrategi tersebut kemudian mulai dikenal sejak tahun 2017 dengan nama strategi *Blue Homeland* atau *Mavi Vatan*. Dalam *Blue Homeland* Laut Mediterania kemudian menjadi salah satu agenda utama untuk diamankan karena adanya potensi sumber daya alam yang dimilikinya serta pentingnya kawasan tersebut untuk keamanan Turki (Ozkarashin, 2020). Konsepsi geostrategi *Blue Homeland* sendiri didasarkan pada peta yang menggambarkan klaim teritori Laut Turki, dan Laut Mediterania merupakan salah satu klaim tersebut.

Kebijakan dari Turki yang asertif itu sendiri kemudian terus meningkatkan tensi diantara Turki dengan Yunani. Tensi yang tinggi tersebut kemudian memuncak pada tahun 2020, ketika Turki memutuskan untuk mengirimkan kapal penelitian seismiknya yang bernama Oruc Reis, untuk melakukan penelitian potensi sumber energi yang berada di kawasan sengketa Laut Aegean (Yildiz dan Cicek, 2020). Kebijakan Turki tersebut sendiri menciptakan kecemasan keras, tidak hanya dari Yunani, tetapi juga dari beberapa negara lainnya seperti Prancis dan Mesir, dikarenakan tindakan Turki tersebut dianggap telah melanggar hukum internasional serta mengancam kedaulatan Yunani. Melihat berbagai tindakan-tindakan asertif dari Turki ke Yunani sendiri, menunjukkan bahwa terdapat perubahan sikap dari Turki terhadap Yunani, dari yang awalnya kooperatif menjadi asertif, oleh karena itu menjadi hal menarik tersendiri untuk membahas terkait alasan-alasan dari perubahan sikap dari Turki tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Turki menerapkan kebijakan luar negeri yang asertif terhadap Yunani pasca Kudeta Turki tahun 2016, walaupun pada tahun-tahun sebelumnya Turki cenderung memiliki hubungan yang baik dengan Yunani?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mencari tahu lebih lanjut terkait mengapa setelah peristiwa kudeta Turki pada tahun 2016, Turki menjadi lebih asertif terhadap Yunani. Penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut terkait alasan Turki mengubah sikapnya dari kooperatif menjadi asertif terhadap Yunani pasca peristiwa kudeta Turki tahun 2016.

1.4 Tinjauan Literatur

Tulisan ini secara garis besar berusaha untuk menjelaskan alasan perubahan kebijakan luar negeri Turki yang menjadi konfrontatif terhadap Yunani terutama pasca peristiwa percobaan kudeta tahun 2016. Menjabarkan jawaban dari pertanyaan tersebut penulis mencoba meninjau dan membandingkan literatur terdahulu yang telah membahas terkait perubahan-perubahan sikap kebijakan luar negeri Turki dengan Yunani. Penulis kemudian menemukan empat argumen yang dapat menjelaskan masalah ini. Literatur pertama berasal dari Tsarouhas (2019) yang berjudul *Greek-Turkish Economic Relations in a Changing Regional and International Context* menjelaskan bahwa dalam masa-masa krisis antara Turki dengan Yunani, situasi regional dan internasional dalam beberapa masa malah memperburuk keadaan diantara kedua negara contohnya dengan keadaan krisis finansial tahun 2008. Walaupun demikian adanya dependensi ekonomi antara kedua negara tersebut terlebih dalam bidang pariwisata, setidaknya telah mencegah konflik yang lebih lanjut. Situasi politik internasional juga beberapa kali memperbaiki hubungan antara kedua negara tersebut contohnya ketika Uni Eropa yang tengah melakukan proses *enlargement* dimana pada saat itu Turkey berusaha masuk kedalam organisasi Uni Eropa yang mengakibatkan terjalinnya relasi yang baik antara Turki dengan Yunani (Izhak, 2012).

Rujukan tulisan selanjutnya yang juga menunjukkan perubahan sikap serta kebijakan luar negeri Turkey terhadap negara lain adalah tulisan dari Altunisik (2020) dalam tulisannya yang berjudul *The New Turn in Turkey's Foreign Policy in the Middle East: Regional and Domestic Insecurities*. Dalam tulisannya Altunisik (2020) membahas bagaimana berbagai kejadian di dalam lingkup domestik dan global yang dialami Turki mengubah sikap dan kebijakan luar negeri Turki terhadap aliansi-aliansinya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, negara-negara Timur Tengah, hingga Russia. Perubahan kebijakan tersebut menurut Altunisik (2020) salah satunya diakibatkan adanya perubahan doktrin kebijakan luar negeri Turki setelah Ahmed Davutoglu diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Turki pada tahun 2016. Semenjak turunnya Davutoglu doktrin baru Turki memiliki argumen baru yaitu bahwa tatanan dunia baru yang multipolar telah muncul dan hal tersebut membuat Turki harus menegaskan kembali posisinya di tatanan tersebut serta melakukan tindakan-tindakan secara independen. Secara domestik sendiri, para elit-elit politik di Turki percaya bahwa kemunculan tatanan baru tersebut membuat Turki tidak lagi bisa bergantung pada aliansi-aliansi tradisionalnya untuk mengejar kepentingan nasionalnya, sehingga saat ini Turki lebih sering melakukan relasi *realpolitik* dengan negara-negara lainnya.

Tulisan selanjutnya yang menjadi rujukan penulis adalah tulisan dari Colombis dan Kentikelenis (2007) yang berjudul *Greek-Turkish Relations and the Kantian Democratic Peace Theory*. Pada dasarnya tulisan ini menjelaskan tentang perubahan hubungan antara Yunani dengan Turki dari yang awalnya penuh ketegangan, hingga mengalami proses *rapprochement* di tahun 1999 lewat kerangka pemikiran *Kantian Democratic Peace Theory*. Dalam tulisannya Colombis dan Kentikelenis (2007) berpendapat bahwa relasi antara Turki dengan Yunani dipengaruhi oleh sistem pemerintahannya. Pada masa-masa sebelumnya Turki yang sistem pemerintahannya masih sangat dipengaruhi oleh militer membuat adanya relasi buruk dengan Yunani yang cenderung lebih

demokratis, walaupun demikian perubahan pemerintahan Turki yang menjadi lebih demokratis membuat Turki dan Yunani mengalami dinamika *rapprochement*. Hal tersebut sendiri dikarenakan karena adanya interdependensi ekonomi antara kedua negara dan kedua negara sama-sama tergabung dalam organisasi regional, dalam hal ini EU dan NATO. Melihat berbagai data yang telah diberikan Colombis dan Kentikelenis (2007) Pada dasarnya Colombis dan Kentikelenis (2007) meneliti relasi antara Turki dengan Yunani lewat kerangka teori *democratic peace theory*, dan melihat bahwa perubahan sikap dari Turki terjadi karena adanya proses demokratisasi yang terjadi di Turki.

Pendekatan selanjutnya dalam menganalisis relasi Turki dengan Yunani adalah pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini digunakan oleh Heraclides (2019) dalam tulisannya yang berjudul *The Greek-Turkish Antagonism: The Construction of Self and Other*. Heraclides (2019) dalam tulisan tersebut, menceritakan bagaimana dinamika relasi antara Turki dengan Yunani dari tahun 1919 hingga tahun 2019. Dari berbagai dinamika sejarah tersebut Turki dengan Yunani telah melewati berbagai macam konflik dan konfrontasi terkait berbagai permasalahan mulai dari isu geopolitik seperti konflik Siprus dan Laut Aegean, hingga isu identitas terkait minoritas Muslim di Turki, berbagai konflik tersebut kemudian membangun adanya sebuah rivalitas diantara kedua negara tersebut dimana dalam hal ini kedua negara saling mengantagoniskan satu sama lain. Millas (2004 dalam Heraclides 2019) juga menyatakan bahwa akibat dari alasan-alasan historis, kedua pihak menganggap pihak lainnya sebagai ancaman atau tantangan terhadap identitasnya, dan menginterpretasi bahwa tiap aksi yang dilakukan pihak lainnya menciptakan lingkaran ancaman. Sehingga sikap Turki sendiri dianggap oleh Heraclides (2019) dibentuk dari identitas dan sejarah kedua negara.

Argumen terakhir terkait alasan perubahan kebijakan luar negeri Turki adalah dikarenakan faktor individu. Argumen perubahan kebijakan luar negeri Turki akibat faktor Individu banyak dibahas oleh Haugom (2019) dalam tulisannya *Turkish Foreign Policy under Erdogan: A Change in International Orientation?* Dalam tulisannya tersebut Haugom (2019) berargumen bahwa terdapat perubahan-perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Turki dibawa kepemimpinan Presiden Erdogan, terutama setelah terjadinya usaha kudeta militer tahun 2016, perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan yang terjadi dalam kepemimpinan Erdogan sendiri adalah adanya fokus yang kuat terhadap isu keamanan nasional, preferensi untuk melakukan relasi berbasis transaksi, dan pencarian otonomi negara yang lebih. Dalam tulisannya Haugom beranggapan bahwa Erdogan yang semakin lama semakin menganut ideologi nasionalisme garis keras membuat Turki juga mengalami perubahan kebijakan luar negeri.

Dari beberapa tulisan tersebut, penulis kemudian melihat adanya kekurangan penelitian terkait kebijakan luar negeri Turki yang mengaitkannya dengan politik domestik dan faktor geostrategi. Penulis menemukan bahwa tulisan dari Altunisik (2020) merupakan tulisan yang paling mendekati tujuan penulisan ini, karena tulisan ini juga berangkat dari pemahaman faktor politik domestik. Walaupun demikian penulis melihat bahwa tulisan Altunisik (2020) kurang menjelaskan kaitan antara perubahan struktural politik domestik dengan kebijakan luar negeri. Selain itu penulis juga belum menemukan adanya tulisan yang mengaitkan perubahan konsep geostrategi Turki dengan perubahan sikap Turki kepada Yunani.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk kemudian melengkapi *gap of knowledge* yang terdapat dalam penelitian-penelitian terdahulu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait kebijakan luar negeri Turki dengan menggunakan pendekatan yang dapat menjelaskan dan menghubungkan bagaimana politik

domestik Turki serta geostrategi mempengaruhi sikap Turki yang menjadi asertif terhadap Yunani. Beberapa teori yang kemudian penulis gunakan adalah teori *two-level game*, teori mobilisasi, dan pendekatan geostrategi.

1.5.1 Teori Two-Level Game

Untuk melakukan analisis terhadap kasus dipaparkan asertivitas Turki terhadap Yunani, penulis menggunakan teori *two-level game* yang pertama digagas oleh Robert Putnam. Teori *two-level game* sendiri secara sederhana adalah sebuah teori yang mengaitkan bagaimana interaksi proses politik domestik dengan proses diplomasi dan negosiasi internasional berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh sebuah negara. Terkait hal tersebut, Putnam (1988) menjelaskan bahwa dasar pemikiran dari teori *two-level game* sendiri adalah bahwa dalam politik internasional terjadi apa yang dinamakan *two-level game* dimana terdapat interaksi antara level internasional dan level domestik. Dalam level domestik kelompok-kelompok kepentingan domestik berusaha menekan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya, dan politikus berusaha mencari kekuatan dengan menciptakan koalisi-koalisi dengan kelompok-kelompok tersebut. Kemudian di level internasional pemerintah berusaha memaksimalkan usahanya untuk memuaskan tekanan publik tersebut, dengan secara bersamaan meminimalisir konsekuensi buruk dari kebijakan luar negeri.

Teori *two-level game* juga menyatakan bahwa seluruh pemimpin negara bermain dalam dua papan permainan yaitu level internasional dan level domestik. Dalam level internasional, pemimpin duduk bersama pemimpin negara lainnya, dan disamping negosiator tersebut ada diplomat dan penasihat internasional yang membantu. Sedangkan dalam level domestik pemain yang ada adalah partai, figur-figur politik, juru bicara dari agensi-agensi nasional, representasi dari kelompok kepentingan, dan konsultan politik pemimpin itu sendiri. Yang kemudian cukup menarik dari

interaksi dua level tersebut adalah bahwa suatu kebijakan yang rasional dalam salah satu level bisa jadi bersifat impolitis bagi pemain yang sama di level lainnya (Putnam, 1988). Interaksi diantara dua level permainan tersebut kemudian menciptakan kompleksitas politik tersendiri, dimana ketika salah satu pemain kunci dalam level internasional merasa tidak puas atas hasil negosiasi, pemain tersebut dapat mengganggu jalannya politik di level tersebut, dan sedangkan jika pemimpin gagal untuk memuaskan pemain lainnya di level domestik, maka pemimpin tersebut beresiko digusur dari kepemimpinannya (Putnam, 1988).

Dalam teori *two-level game* terdapat salah satu konsep penting yang menjadi salah satu dasar dari teori tersebut. Konsep yang dimaksud kemudian adalah *win-set*. *Win set* sendiri dijelaskan oleh Putnam (1988, dalam Morin dan Paquin, 2018) sebagai rangkaian kemungkinan-kemungkinan dari kesepakatan internasional yang dapat diterima oleh aktor politik dan sosial di level domestik. Dengan kata lain *win-set* berbicara tentang besar kecilnya kemungkinan aktor-aktor domestik menerima kebijakan atau kesepakatan tersebut. Hal tersebut kemudian membuat pembuat kebijakan atau negosiator hanya menawarkan kebijakan atau kesepakatan yang hasilnya dapat diterima oleh aktor-aktor di level domestik. Artinya semakin besar *win-set* yang ada maka suatu kebijakan dapat lebih mudah diterima di tingkat domestik karena konstituen domestik dapat menerima banyak variasi kebijakan, tetapi jika *win-set* yang ada kecil maka suatu kebijakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konstituen domestik.

Selanjutnya menurut Putnam (1988, dalam Morin dan Paquin, 2018) terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi *win-set* itu sendiri. Yang pertama adalah variabel besarnya batasan yang diberikan dari institusi negara, artinya dalam melihat *win-set* kita harus memahami bagaimana proses kebijakan itu diproses dalam badan pemerintahan negara, contohnya suatu negara mungkin membutuhkan persetujuan dari parlemen, pemerintah negara bagian, atau bahkan referendum

untuk meratifikasi sebuah perjanjian atau kebijakan internasional. Artinya semakin tinggi batasan dari negara, maka fleksibilitas negosiator dalam negosiasi level internasional akan semakin berkurang. Variabel kedua adalah tingkat kohesi dan mobilisasi aktor sosial mulai dari perusahaan, NGOs, dan etnik minoritas. Jika aktor-aktor tersebut secara lugas menyuarakan preferensinya, maka negosiator tidak dapat mengabaikannya dan akhirnya mengurangi ruangnya lagi untuk bermanuver di level internasional. Variabel ketiga adalah strategi yang digunakan oleh negosiator itu sendiri. Artinya negosiator atau pemimpin pemerintahan dalam hal ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan manuver-manneuver tersendiri untuk menciptakan situasi yang lebih menguntungkan.

Teori ini sendiri pada umumnya digunakan untuk melakukan analisis terkait isu-isu negosiasi ekonomi. Walaupun demikian, teori ini juga dapat digunakan dalam menjelaskan tentang ketegangan keamanan serta konflik dimana tidak ada proses negosiasi formal di dalamnya (Morin dan Paquin, 2018). Pemimpin politik dalam kasus tersebut dapat mempromosikan isu keamanan internasional untuk membuka ruang manuvernya di dalam panggung politik domestik. Beberapa pemimpin diktator menggunakan strategi ini, dengan memainkan ancaman-ancaman eksternal untuk mempertahankan rezim otoritariannya.

1.5.2 Strategi Mobilisasi Kebijakan Luar Negeri untuk Memperoleh Simpati dalam Negeri

Teori strategi mobilisasi, adalah teori yang dikemukakan oleh Joe D. Hagan (1994) dalam tulisannya yang berjudul *Domestic Political System and War Proneness*. Dalam tulisan tersebut Joe Hagan menjelaskan beberapa strategi pemerintahan untuk mengurangi batasan-batasan politik domestik agar pemerintah dapat menjadi lebih fleksibel dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Dari berbagai strategi yang dipaparkan tersebut, penulis kemudian memilih untuk

menggunakan satu strategi yang menurut penulis paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis topik ini, yaitu strategi mobilisasi.

Dalam tulisannya Hagan (1994) menjelaskan bahwa strategi mobilisasi digunakan untuk menciptakan dukungan untuk rezim dengan mengambil aksi tegas dalam isu internasional. Tujuan utama dari penggunaan strategi ini adalah untuk memobilisasi dukungan baru bagi rezim pemerintahan serta kebijakannya, dan mencegah berkurangnya dukungan yang sudah ada. Strategi ini seringkali diasosiasikan dengan pemimpin yang mencoba mengalihkan ancaman kepada rezim pemerintahan dengan beberapa cara yaitu (1) membawa tema nasionalisme dan imperialisme, atau mengkambinghitamkan aktor-aktor luar negeri; (2) meningkatkan citra publik dari keputusan pemimpin terkait keamanan nasional dan status internasional; dan/atau (3) mengalihkan perhatian dari masalah-masalah domestik yang ada (Russett, 1990 dalam Hagan, 1994). Dalam dinamikanya penggunaan strategi mobilisasi ini kemudian seringkali menciptakan kebijakan luar negeri yang bersifat kuat, memaksa, dan konfliktual yang dapat memperjelas posisi serta kemampuan. Hagan (1994) juga menyatakan bahwa strategi ini cenderung terbatas pada retorika dan provokasi, tetapi tidak ditujukan untuk memulai konflik, kecuali terdapat situasi di level domestik yang membuat negara terpaksa melakukan konflik.

1.5.3 Pengaruh Aspek Geostrategi dalam Politik Luar Negeri

Geostrategi merupakan sebuah ilmu turunan yang berasal dari teori-teori geopolitik. Secara definitif geostrategi sendiri dapat dikaitkan dengan strategi perang atau juga acuan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Tovy (2015) geostrategi menghubungkan antara geografi dengan strategi perang, ilmu ini menempatkan perencanaan dan manajemen perang dalam konteks karakteristik geografis, fisik, dan artifisial dari wilayah tempat negara tersebut beroperasi. Sedangkan menurut Gyrgiel (2006) geostrategi adalah acuan geografis dari kebijakan luar negeri

suatu negara, atau lebih tepatnya geostrategi mendeskripsikan dimana negara harus mengkonsentrasikan kekuatannya dengan mengerahkan kekuatan militer dan juga aktivitas diplomatisnya di suatu tempat tertentu. Dalam penjelasan Gyrgel tersebut, kita dapat melihat bahwa geostrategi memiliki relasi yang kuat dengan kebijakan luar negeri suatu negara, karena geostrategi yang digunakan oleh suatu negara akan menjadi salah satu dasar bagi negara dalam membentuk kebijakan luar negerinya.

Geostrategi juga menjadi acuan bagi suatu negara terkait di area mana negara tersebut harus memfokuskan kekuatan kebijakan luar negerinya. Walaupun demikian perlu dipahami bahwa geostrategi dari suatu negara tidak harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor geografis ataupun geopolitik, karena menurut Gyrgiel (2006) suatu negara dapat mengerahkan kekuatannya di suatu lokasi karena alasan-alasan ideologis, pemikiran-pemikiran kelompok kepentingan, ataupun hanya karena keinginan dari pemimpin negara itu sendiri. Geostrategi juga bersifat fleksibel, artinya dia dapat berubah dalam waktu yang singkat sesuai dengan proses birokrasi atau politik dari suatu negara.

Salah satu variabel penting yang mempengaruhi geostrategi kemudian adalah batas dari suatu negara. Gyrgiel (2006) menyatakan bahwa negara diatas segalanya akan mencoba untuk melindungi wilayah teritorinya dari invasi dan serangan, dan batas suatu negara menjadi ukuran keamanan teritorial yang baik.. Batas teritori suatu negara juga menjadi penting karena menentukan besar kecilnya ruang gerak suatu negara, dan jika terjadi ancaman atau instabilitas terhadap teritori suatu negara, maka ruang gerak dari negara tersebut juga ikut terancam. Oleh karena itu geostrategi dapat dikatakan sangat krusial bagi ketahanan hidup suatu negara.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran sebelumnya, penulis kemudian memiliki hipotesis bahwa asertivitas Turki terhadap Yunani disebabkan oleh

- Adanya perubahan dinamika politik Turki di level domestik yang semakin bersifat nasionalis ditambah dengan melemahnya posisi AKP dalam pemilu, menyebabkan AKP mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Yunani demi menarik dukungan dari masyarakat dan partai nasionalis.
- Adanya pandangan geostrategi Turki terkait posisi strategisnya di Laut Mediterania Timur dan Laut Aegean

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Asertivitas dalam Hubungan Internasional

Dalam berbagai bahan bacaan, istilah asertivitas seringkali berkaitan dengan studi psikologi dan komunikasi. Dalam kedua bidang studi tersebut, tindakan asertif dapat dikatakan berada di tengah-tengah antara perilaku pasif dan agresif. Dalam studi komunikasi sendiri perilaku pasif ditunjukkan lewat tindakan seperti menangis atau mengeluh sedangkan perilaku agresif ditunjukkan lewat tindakan seperti berteriak, sarkasme, memanipulasi, atau intimidasi dan perilaku asertif berada ditengah-tengah kedua perilaku tersebut yang artinya suatu individu dapat membela dirinya sendiri dan mengekspresikan dirinya sendiri secara jelas dengan menerima dan menghargai perasaan atau keinginan orang lain (Lodestone, 2020). Jika melihat hal tersebut, dalam konteks hubungan internasional sendiri, istilah asertif berakar dari konsep psikologi dan komunikasi.

Penggunaan istilah asertif dalam hubungan internasional sendiri sebenarnya masih belum terlalu sering digunakan dan penjelasan secara konseptualnya sendiripun masih belum banyak dijelaskan. Salah satu penulis yang kemudian mencoba memberi penjelasan terkait sikap asertif suatu negara

adalah Alastair Iain Johnston yang menuliskan bahwa asertivitas dalam politik internasional merujuk pada bentuk dari diplomasi asertif yang secara eksplisit memberi ancaman atau memberikan denda terhadap aktor lain yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya (Johnston, 2014). Johnston (2014) juga menyatakan bahwa asertivitas juga dapat diartikan cara suatu negara menunjukkan kepercayaan dirinya dan ekspresi secara langsung negara untuk mempertahankan hak atau klaim dari negara tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan sikap asertif suatu negara ditunjukkan dengan cara yaitu (1) mempertunjukkan kekuatannya di area dimana suatu negara melakukan klaim terhadap kawasan tersebut, hal ini dapat dicontohkan dari apa yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan dimana Tiongkok seringkali melakukan militerisasi di kawasan yang diklaim olehnya, (2) penggunaan kritik atau ancaman dari pejabat negara terhadap suatu negara yang dianggap mengganggu atau memprovokasi negaranya (3) memberikan sanksi atau hukuman kepada negara yang melanggar klaim tersebut, baik berupa sanksi ekonomi ataupun pemutusan hubungan bilateral, hal ini juga dilakukan oleh Tiongkok dimana Tiongkok mulai memberikan sanksi ekonomi berupa pengetatan regulasi impor kepada Filipina akibat terjadinya konfrontasi di salah satu kepulauan Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Tiongkok (Chen et al, 2020). Sikap asertif sendiri kemudian dari beberapa tulisan juga ditunjukkan dengan adanya upaya memperkuat militer suatu negara demi menunjukkan kapabilitas kekuatan negaranya terhadap negara lain dan melakukan tindakan-tindakan provokatif yang terukur untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Walaupun demikian dalam perilaku asertif, suatu negara masih menghargai hak dari negara lain.

1.8 Metodologi

1.8.1 Tipe Penelitian

Tulisan ini termasuk dalam klasifikasi tipe penelitian eksplanatif karena menjawab pertanyaan mengapa suatu hal terjadi serta mencari relasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian eksplanatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dari suatu fenomena dengan mengacu pada suatu teori yang ada. Dalam tulisan ini sendiri penulis berusaha menjawab alasan dibalik asertivitas Turki terhadap Yunani pasca peristiwa percobaan kudeta tahun 2016

1.8.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam jangka waktu mulai dari tahun 2016 pasca berakhirnya kudeta di Turki hingga tahun 2020. Walaupun demikian penulis juga menggunakan data-data dari tahun-tahun sebelum 2016 karena relasi antara Turki dengan Yunani telah ada pada tahun-tahun sebelum itu dan data dari tahun-tahun sebelumnya juga dapat memperkaya penjelasan yang diberikan dari tulisan ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini penulis mencari dan mendapatkan data dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari berbagai pernyataan resmi dari pemerintah Turki atau Yunani yang dikumpulkan melalui laman (*web*) resmi dari pemerintahan dan pidato-pidato yang dilakukan elit politik Turki atau Yunani. Sumber sekunder didapatkan dari terbitan buku, jurnal, artikel, majalah, surat kabar, makalah, arsip, laporan, hasil survey terdahulu.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis dan rumusan masalah penelitian, penulis menerapkan analisis kualitatif. Dengan menggunakan analisis data kualitatif penulis berusaha menjelaskan pola dari konsep dan pengetahuan yang ada dari hasil interpretasi lewat sumber-sumber seperti Jurnal, buku, transkrip pidato, dan lainnya. Maka secara garis besar teknik analisis dalam penelitian ini berfokus pada interpretasi dari penulis yang berkaitan dengan berbagai sumber yang telah didapatkan.

1.8.5 Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, tinjauan literatur, teori, serta hipotesis yang telah ditentukan oleh penulis. Pada bab kedua penulis menjelaskan lebih lanjut terkait dinamika relasi Turki dengan Yunani sebelum dan sesudah terjadinya percobaan kudeta Turki tahun 2016. Kemudian pada bab ketiga penulis menjelaskan faktor politik domestik Turki pada yang membuat sikap Turki terhadap Yunani menjadi asertif. Pada bab keempat penulis membahas tentang konsep Geostrategi Turki yang dinamakan *Blue Homeland* yang kemudian membuat Turki menjadi asertif terhadap Yunani khususnya di laut Mediterania dan Laut Aegean. Terakhir dalam bab kelima penulis memberikan kesimpulan dari penjelasan dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.